

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Hamid S Attamimi, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Huukum Tata Pengaturan), Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1993.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta : Kencana, 2005.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum, Ed. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Andi Pangerang Moenta, dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: RajaGrafindo Persada : 2018.
- Amiroedin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya), Bandung : Rineka Cipta, 1997.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teknik Teoritisasi Data, ter.Muhammad Shodiq dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Arief Sidharta Bernard, 1999, “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”. Mandar Madju, Bandung
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asshidiqie, Jimly. Green Contitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Astawa, I Gde Pantja. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: Armico, 2008.
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IND-HILL.Co, 1992
- Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1997.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni, Bandung, 1997)
- Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Armico, 1987
- Bambang Antariksa, Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia, Deliberatif, Volume 1 Nomor 1, Juli 2017.
- B. Arief Sidharta, Makalah Seminar: Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Pancasila, Jakarta, 2006.
- Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan

- Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990)
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008)
- Ekatjahjana, Widodo. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Hamidi, Jazim et.al. Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Jakarta: Pustaka Publisher, 2008
- Handoyo, B. Hestu Cipto. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, (Jakarta: Erlangga, 2010),
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada : 2020.
- I Dewa Gede, Asas-asas Pembentukan Produk Hukum, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, perihal Undang-undang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu,
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-6, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Bagian 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan), Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012
- Nukila Evanty, Nurul Ghufron, Paham Peraturan Daerah (Perda) berspektif HAM (Hak Asasi Manusia), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2014
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Terjemahan), Bandung: Nusamedia, 2007)
- M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Bandung:

- Mandar Maju, 2009
- Natabaya HAS, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2008. Jakarta. Konstitusi Press dana Tatanusa
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta : 2020
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Rio Admiral Parikesit, *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 4 - Desember 2021
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navianto, Lucky Endrawati, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014,
- Saifudin, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sri Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (edisi Ketiga), Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, hlm.2
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012,
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, salah satu fungsi asas legalitas adalah sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah. (Ridwan HR)
- Padmo Wahyono, Ilmu Negara (Indo-Hill Co., Jakarta, 1999),
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hal. 990
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian), Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

B. UNDANG-UNDANG :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. JURNAL :

- A. Hamid S. Attamimi, 1982, "Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan", BPHN, Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tanggal 1 s/d 20 Juni 1981, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Ali Marwan HSB, De Jure, Mengkritisi pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, Jurnal Volume 16 Nomor 3, Jakarta, 2016.
- Andi Bau Inggit AR, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Restorative Justice, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019;
- Asrul Ibrahim. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- VCRAC Crabbe, Legislative Drafting, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm. 4. 2. 0 database/artikel/htn/dasar2.pdf. diakses 28 Februari 2020
- Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2, 2009.
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005
- Muhtadi, Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013;

- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navianto, Lucky Endrawati, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Rio Admiral Parikesit, *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 4 - Desember 2021
- Suhartono, harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja Negara (disertasi : fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, hlm.1. <http://www.legalitas.org/>
- Philipus M.Hadjon, Analisis terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (makalah), Seminar Hukum Nasional “Implementasi UU No 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004”, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 21 Mei 2005

D. WEBSITE :

- <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/05/20/perbedaan-hukum-formil-dan-materil-berdasarkan-sumber-hukumnya/> Penulis : Joni Kasim
Editor : Nora Listiawati Publisher : Radhes Langgeng
- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/848>
- <https://onsearch.id/Record/IOS1683.article-848?widget=1>
- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>
- <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920>